

**SKRIPSI**

**STATUS DAN PENGARUH LEMBAGA DAYA ANAGATA NUSANTARA**

**DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**



**OLEH :**  
**FERI AGUSTIAN**  
**NIM :502022308**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjan Hukum**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STATUS DAN PENGARUH LEMBAGA DAYA ANAGATA NUSANTARA  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAMA:FERI AGUSTIAN**  
**NIM :502022308**

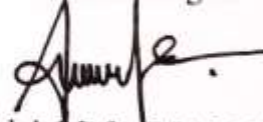
Disetujui untuk diajukan dalam siding skripsi

Pembimbing I



Dr.Slamet Riyanto,S.H.,M.H  
NBM/NIDN:970377/0010097502

Pembimbing II



Abdul Jafar,S.H.,M.H  
NBM/NIDN:1337456/0230129102

Mengetahui,  
Program Studi  
Fakultas Hukum Universitass Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



Yudistira Rusyidi, S.H.,M.Hum  
NBM/NIDN:1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: STATUS DAN PENGARUH LEMBAGA DAYA ANAGTA  
NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**



**NAMA** : Feri Agustian  
**NIM** : 502022308  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**PRGORAM KEKHUSUSSAN** : HTN

**Pembimbing,**

1. Dr. Slamret Riyanto, S.H., M.H
2. Abdul Jafar, S.H., M.H

( *Slamret Riyanto* )  
( *Abdul Jafar* )

Palembang,

April 2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H

**Anggota** : 1. Dr. Reny Oktaprianti, S.H., M.Hum  
2. Yonani, S.H., M.H

( *Darmadi Djufri* )  
( *Reny Oktaprianti* )  
( *Yonani* )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIIYAH PALEMBANG**

( *Abdul Hamid Usman* )  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas**

**Muhammadiyah Palembang Strata-1**

NAMA :Feri Agustian

NIM :502022308


PRODI :Ilmu Hukum

JUDUL : Status Dan Pengaruh Lembaga Daya Anagata Nusantara  
Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian  
komprehensif, penulis berhak memakai gelar.

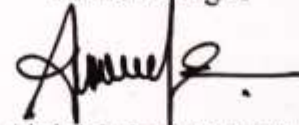
### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H  
NBM/NIDN:970377/0010097502

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H  
NBM/NIDN:1337456/0230129102

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri agustian

NIM : 502022308

Email : [agustianferi03@gmail.com](mailto:agustianferi03@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Status Dan Pengaruh Lembaga Daya Anagata Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Feri agustian

502022308

**MOTTO**

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Fa bi`ayyi ālā`i rabbikumā tukażżibān

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

(Q.S Ar-Rahman ayat 13)

فَلْتَعَرَّضْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلْيُغَرِّبْكُمْ بِاللَّغْوِ الرَّغْوُورُ

fa lā tagurrannakumul-ḥayātud-dun-yā, wa lā yagurrannakum

billāhil-garur

Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.

(Q.S Fatir ayat 5)

**Saya persembahkan skripsi ini untuk:**

*Orang tua dan keluarga terhormat  
Saudara- saudara ku tersayang  
Teman- teman seperjuangan  
Almamaterku*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Feri Agustian  
NIM : 502022308  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 2004  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Jambu No 1005  
No Telp : 089625378203  
Email : [agustianferi03@gmail.com](mailto:agustianferi03@gmail.com)  
No Hp : 089625378203  
Nama Ayah : Mursal  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Jambu No 1005  
No. Hp : 089625378203  
Nama Ibu : Dewi Fajariah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Jambu No 1005  
No. Hp : 081280473572  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan\*)

TK : Tunas Rimba  
SD : SD Negeri 112 Palembang  
SMP : SMP Negeri 53 Palembang  
SMA : SMK Muhammadiyah 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan / Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2022.

## ABSTRAK

### STATUS DAN PENGARUH LEMBAGA DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Pembentukan danantara salah satu upaya pemerintah dalam menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang dikategorikan sebagai *sovereign wealth fund (SWF)* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga danantara dan pengaruh danantara terhadap badan usaha milik negara (BUMN) baik dari fungsi dan tugas. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historis approach*) dengan menelaah berbagai perundang-undang yang berkaitan dengan objek dan landasan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan danantara termasuk state auxiliary organs yang dibentuk untuk menunjang fungsi lembaga bersifat independen. Pengaruh danantara terhadap BUMN mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kekuasaan antara tugas danantara dan BUMN berpotensi adanya konflik politik, perubahan entitas oleh kementerian BUMN. Dengan demikian penguatan regulasi sangat diperlukan untuk memperjelas kedudukan dan fungsi serta menjamin kepastian hukum terhadap lembaga lain.

**Kata kunci:** Daya Anagata Nusantara ,Kedudukan Dan Fungsi, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Negara, Hukum Tata Negara, Investasi Asing Langsung, Dana Kekayaan Negara

## **ABSTRACT**

### **THE STATUS AND INFLUENCE OF THE INDONESIAN ARCHIPLAGO POWER INSTITUTION IN THE STATE SYSTEM**

The establishment of danantara is one of the government's efforts to ensure sustainable economic growth, categorized as a sovereign wealth fund (SWF) in Indonesia. This study aims to analyze the position and function of the danantara institution and its influence on state-owned enterprises (SOEs), both in terms of function and duties. This study uses a normative method with a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach by examining various laws related to the object and the appropriate basis. The results show that danantara is a state auxiliary organ formed to support the function of an independent institution. The influence of danantara on SOEs results in overlapping powers between the duties of danantara and SOEs, potentially leading to political conflict and changes in entities by the SOE ministry. Thus, strengthening regulations is essential to clarify the position and function and ensure legal certainty for other institutions.

**Keywords:** Daya Anagata Nusantara, Position and Function, State-Owned Enterprises, State Institutions, Constitutional Law, Foreign Direct Investment, Sovereign Wealth Fund, Constitutional Law

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

Status Dan Pengaruh Lembaga Daya Anagata Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Dr. Slamet Riyanto,S.H.,M.H pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi semangat, memberi nasihat, motivasi dan arahan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
6. Bapak Abdul Jafar,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan-arahan, semangat dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Seluruh keluargaku tersayang yaitu Bapak, Mamak, Kakak, Uuk (ayuk) yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa- masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, April 2026

Penulis,

Feri Agustian

502022308

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGATAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Riview Studi Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Welfare Estate.....	16
B. Lembaga Negara .....	19
C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	25
B. Status Kelembagaan Danantara Dalam Prsepektif Hukum Lembaga Negara .....	33
C. Pengaruh Danantara Terhadap Status Badan Usaha Milik Negara(BUMN).....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, Serta Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025, melandasi terbentuknya Danantara kemudian mencakup beberapa ketentuan yang mengatur Badan Pengelola Investasi Danantara. Diskusi yang muncul tidak hanya fokus pada jumlah biaya pembekalan yang ditatur danantara, sebagaimana disebutkan dalam peraturan undang-undang, tetapi dapat meliputi aspek penataan, struktur lembaga, kontrol, serta wewenang, mengingat skala besar dana yang akan ditangani oleh badan tersebut.<sup>1</sup>

Upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi penanaman modal serta mempermudah upaya yang bertujuan memperbesar arus investasi masuk kedalam negeri. Di samping itu upaya peningkatan penanaman modal langsung harus mempertimbangkan sudut pandang dan kepentingan investor asing. Oleh karena itu, dalam kondisi ini memerlukan sebuah lembaga yang dapat menjadi salah satu sasaran rencana terhadap investor. dengan fondasi norma dan kelembagaan yang kuat sehingga penerapan pelaksanaan dan ukuran internasional, agar bisa berperan

---

<sup>1</sup> Vina Hardyana Infantri and Retno Meilani, "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 378–91, <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5132/3901>.

sebagai penghubung bagi investor menaruh aset investasi atau *Foreign Direct Investment* FDI di suatu negara.

Investasi memainkan peran inti mengenai proses pengakkan finansial., terkhusus pemerinntah yang maju. dengan adanya aset penanaman modal dalam waktu lama yang diatur secara ahli dan terbuka sangat diperlukan guna menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara, sehingga pembangunan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi, salah satunya melalui pembentukan *Sovereign wealth fund* (SWF). SWF merupakan sumber kekayaan milik negara yang dibentuk sebagai penata aset, terutama aset luar negeri, secara jangka panjang. Kehadiran SWF menjadi strategi penting dalam pengelolaan kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya tahan kegiatan bisnis dalam negeri dalam melawan tantangan ekonomi internasional serta meningkatkan daya saing bangsa.<sup>2</sup>

Lembaga Daya Anagata Nusantara dirancang selaku objek pengatur penanaman modal utama yang mempunyai tugas untuk penggabungan serta menstabilkan kumpulan aset penanaman modal, dengan tujuan memperkuat perkembangan cepat dalam membangun finansial terjamin ditingkat nasional. sumber utama investasi yang dikelola Danantara berasal dari aset Badan Usaha

---

<sup>2</sup> Muh Farhan Ar Rusyda, "Peran Dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF)," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 969–88, <https://doi.org/10.1007/s10272-008-0268-5>.

Milik Negara (BUMN) Dalam konteks perbandingan, Danantara menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek pembentukan hukum, struktur kelembagaan, serta fungsi operasional jika dibandingkan dengan *Sovereign Wealth Fund (SWF)* di negara lain, diantaranya *Temasek Holdings* di Singapura dan *Khazanah Nasional Berhad* di Malaysia.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, Danantara menekankan landasan pengelolaan yang baik (*good governance*), transparansi, kehati-hatian, serta integritas tinggi, sebagaimana arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Struktur tata kelola Danantara dirancang berlapis dengan Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, *Oversight Committee*, Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Etika untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Namun demikian, kelahiran Danantara justru memunculkan problematika dalam hukum tata negara, terutama terkait kejelasan status hukumnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 3E Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara (BUMN) mengatur pelimpahan kewenangan pengelolaan BUMN kepada danantara untuk mengelola dividen, membentuk holding investasi, dan meningkatkan investasi, tidak hanya itu dalam pasal yang sama yaitu pasal 3F menjelaskan wewenang danantara secara rinci atas pengelolaannya kepada pembentuk holding investasi

---

<sup>3</sup>Rusyada Muh farhan, "Peran Dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF)" 2, no. 6 (2025): 969, <https://doi.org/10.1007/s10272-008-0268-5>.

<sup>4</sup> Maria Magdalena and Fontaine Butarbutar, "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) Status Dan Pengawasannya Dalam Sistem Ketatanegaraan" 5, no. 2 (2025).

dan dividen BUMN. Pasal tersebut diharapkan bisa menaikkan dan menstabilkan penanaman modal agar dalam pelaksanaan BUMN terjamin termasuk asal anggaran sebagainya.<sup>5</sup>

Danantara berkaitan erat dengan kelembagaan sebagai pengelola investasi pemerintah akan tetapi kemunculannya tersebut menjadi tantangan besar bagi kelembagaan seperti dalam hal tata kelola, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan politik yang memberikan dampak buruk. Secara hukum Danantara adalah *Sui Generis* Lembaga independen dibawah presiden diluar stuktur kementerian dan lembaga biasa.

Keberlangsungan BUMN diharapkan keikutsertaan yang berpengaruh untuk pembangunan finansial negara indonesia dimulai sejak zaman kemerdekaan. lewat bermacam penanganan dan hasil karyanya, BUMN ialah perwujudan kewenangan dan kewajiban negara untuk melengkapi keperluan mendasar suatu warga negara di iringi dengan menjalankan perputaran ekonomi, seleksi dalam perancangan BUMN bukan sekedar pengurusan, melainkan mempunyai keterkaitan dengan nilai prioritas tinggi mengenai berbagai badan usaha bisa melakukan tugasnya secara maksimal. banyaknya bentuk mempunyai kakteristik kelebihan dan kekurangan disetarakan dengan tujuan penegakkannya, bisakah berpegang teguh pada penanganan umum atau perolehan untung dalam aktivitas ekonomi. tidak hanya itu BUMN harus menjadi katalisator pembangunan ekonomi nasional,

---

<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara," Lembaran Negara RI tahun 2005 (2025).

Pengadaan penanganan umum yang terjamin, dan aktor utama berbagai macam bidang prioritas yang terjaring oleh pihak swasta.<sup>6</sup>

Danantara memiliki keterkaitan strategis dengan BUMN karena berfungsi sebagai entitas yang mengelola, mengkonsolidasikan, dan mengoptimalkan aset negara yang bersumber dari BUMN. Melalui pengelolaan yang terpusat dan berbasis prinsip investasi jangka panjang, Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme pengelolaan BUMN, mengurangi fragmentasi kebijakan, serta mendorong peningkatan nilai tambah dan kemampuan berkompetisi BUMN dari segi nasional maupun internasional, tanpa menghilangkan peran instansi sebagai instrumen pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks diatas, menarik untuk dilaksanakan kajian secara terperinci terhadap kedudukan hukum dan fungsi kelembagaan lembaga danantara, baik dari aspek teori hukum tata negara maupun implementasi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi lembaga danantara dalam struktur kelembagaan negara, menggali dasar hukum pembentukannya, serta menganalisis peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Dengan memahami secara utuh kedudukan dan fungsi lembaga danantara,

---

<sup>6</sup> Mabruhi salim Pudyas, "BUMN Adalah Badan Usaha Milik Negara, Pahami Fungsi, Dan Peran Pentingnya Dalam Perekonomian Indonesia," n.d.

Semoga penulisan ini memiliki peran kontribusi menyangkut pengembangan teori kelembagaan dalam kajian hukum tata negara dan sebagai acuan pemikiran dalam perumusan kebijakan hukum di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah status kelembagaan Danantara dalam prespektif hukum Lembaga negara?
2. Bagaimanakah pengaruh Daya Anagata Nusantara terhadap status badan usaha milik negara (BUMN)?

## **C. Ruang Lingkup**

Kajian ini menerapkan beberapa ruang lingkup diantaranya bidang kajian HTN dan hukum lembaga dikarenakan kajian tersebut saling berkaitan yang sama-sama berfokus pada studi konstitusi, struktur dan fungsi lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara, serta perlindungan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Dalam konteks HTN dan hukum lembaga negara, Danantara menjadi menarik untuk dikaji karena kedudukannya berada pada persimpangan antara fungsi negara dalam mengelola kekayaan negara dan mekanisme korporasi dalam pengelolaan investasi. kajian ini juga menyoroti status badan usaha milik negara yang melakukan tugas nya di bidang perekonomian setelah adanya danantara dalam melaksanakan tugas dan fungsi. maka demikian ruang lingkup tersebut untuk mendasari penelitian ini dan memperjelas batasan pembahasan agar penelitian menjadi lebih terarah dan tidak melebar ke berbagai topik yang tidak relevan yang mebidang kajian HTN, hukum lembaga negara dan badan usaha milik negara.

#### **D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai menyediakan pengetahuan akademis kepada masyarakat umum, yang memfasilitasi pemahaman pembaca mengenai Lembaga Non-Struktural, di antara aspek-aspek lainnya:

- a. Menganalisis status Lembaga danantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
- b. Menjawab pengaruh danantara terhadap status badan usaha milik negara BUMN

##### 2. Manfaat penelitian

Dari tujuan diatas penulis berharap kepada pembaca memberikan manfaat yang baik diantaranya:

- a. Memberikan pemahaman konsep Lembaga danantara.
- b. Memberikan referensi akademik mengenai Lembaga danantara.
- c. Memberikan pemahaman peran dalam pelayanan Lembaga danantara terhadap publik.
- d. Bentuk dalam mendapatkan gelar sarjana

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### 1. Konsep lembaga negara dan Lembaga non struktural (LNS)

###### a. Konsep lembaga negara

Lembaga negara dalam Bahasa belanda disebut *staatsorgaan*.

Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah yaitu

badan negara, atau organ negara.<sup>7</sup> Selaku negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintah Indonesia mengaplikasikan suatu teori yaitu trias politika. Maksudnya adalah pemecahan kewenangan pemerintah dibagi beberapa diantaranya tiga bidang yang mempunyai kesteraan antara satu sama lain.<sup>8</sup> diantaranya ialah eksekutif, legislatif, yudikatif. Masing-masing bidang memiliki kewenangan dan fungsi saling berkaitan dalam membantu menjalankan pemerintahan di Indonesia.

b. Konsep Lembaga non-struktural (LNS)

Lembaga non-struktural, atau lebih dikenal dan disingkat sebagai *LNS*, merupakan lembaga di luar instansi atau organisasi pemerintah bukan termasuk kedalam instansi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah (PP), atau peraturan presiden (Perpres), dengan anggaran akan ditanggung pada anggaran belanja negara.<sup>9</sup>

2. Konsep hubungan kedudukan dan fungsi

Kedudukan dan fungsi menunjukkan status dan identitas dalam sebuah hirarki yang menjelaskan keberadaan objek serta menjadi dasar

---

<sup>7</sup> UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 2020, [https://digilib.uinsgd.ac.id/38717/1/Buku Hukum Lembaga Negara.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/38717/1/Buku%20Hukum%20Lembaga%20Negara.pdf).

<sup>8</sup> Bagus Anwar, *Hukum Kelembagaan Negara*, 2016, [http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/4\\_MODUL\\_HUKUM\\_KELEMBAGAAN\\_NEGARA.pdf](http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/4_MODUL_HUKUM_KELEMBAGAAN_NEGARA.pdf).

<sup>9</sup> "Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural," Pub. L. No. 05 (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/112713/pmk-no-75pmk052017>.

atau acuan untuk menjalankan tugas sebagai objek dan mengetahui aktivitas apa yang harus dijalankann.

## F. Review Studi Terdahulu

Dengan melampirkan ini untuk mendukung penelitian ini penulis menambahkan riveiw studi yang relevan dan memberikan konteks yang mendasari teori dipenlitian ini.dan mengevaluasi penelitian ini agar bermanfaat.maka dari mari kita simak tabel penelitian yang relevan berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian terdahulu relevan**

No	Nama peneliti dan tahun	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novena Margaretha Daro <sup>10</sup> 2025	Pertanggung jawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian dalam Pengelolaan Investasi Danantara	Metode pada penelitian inni menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif mencerminkan analisis.	Danantara bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap hutang dari negara lain atau tahapan komoditas yang dinamis untuk membiayai pembangunan

---

<sup>10</sup> Novena Margaretha Daro, "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( Danantara ) Jika Terjadi Kerugian Dalam" 5, no. 2 (2025).

2	a.M. Iqbal Asnawi, b.Mus-tika Putra Rokan, c.M. Irfan Islami Rambe. <sup>11</sup> 2025	Peran Lembaga Pengelola Investasi dalam Menunjang Investasi Nasional	Metode pendekatan yuridis normatif	harapan dan angin segar yang mampu berperan sebagai mitra strategis yang memberikan kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
3	Dadang Solihin, Antoni Ludfi Arifin, Joko Nugroho <sup>12</sup> 2025	Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan	Kajian ini menerapkan metode normatif.	memastikan bahwa perubahan kerangka hukum ini dibarengi dengan tata kelola yang memenuhi prinsip GCG, agar tujuan pembentukan Danantara tercapai tanpa mengorbankan akuntabilitas publik.
4	Rahma Hidayati <sup>13</sup> 2025	Dampak Danantara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Laju	penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka kualitatif.	keberhasilan Danantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di

<sup>11</sup> M Iqbal Asnawi et al., "Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 5, no. July (2024), <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>.

<sup>12</sup> Dadang Solihin, Antoni Ludfi Arifin, and Joko Nugroho, "Danantara: Pilar Ekonomi Atau Beban Negara?," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 12, no. NO. 1 JANUARI-APRIL (2025): 225–35.

<sup>13</sup> Rahma Hidayati, "Dampak Danantara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Laju Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 21, no. 02 (2025): 197–208.

		Pembangunan di Indonesia		Indonesia sangat bergantung pada efektivitas tata kelola serta strategi investasi yang diterapkan. Dengan aset yang besar dan dukungan penuh dari pemerintah, Danantara memiliki potensi menjadi game-changer bagi ekonomi nasional.
5	Natasa Liu1, Irmanjaya Thaher <sup>14</sup> 2025	Transparansi dan akuntabilitas dana publik oleh Danantara: Tinjauan konstitusional dalam pengawasan eksternal pencegahan korupsi	Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian normatif sebagai jenis penelitian.	Masyarakat dianggap memiliki peranan penting yang dapat memengaruhi akuntabilitas penataan keuangan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran menandai awal dari partisipasi mereka..

---

<sup>14</sup> Natasa Liu and Irmanjaya Thaher, "Jurnal Ilmiah Hukum Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Publik Oleh Danantara : Tinjauan Konstitusional Dalam Pengawasan Eksternal Pencegahan Korupsi" 4, no. 4 (2025):2830-0092.

Dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan Lembaga Danantara adalah Lembaga yang mengatur kekayaan negara yang bergerak dalam bidang investasi yang diharapkan bisa mendukung dari segi ekonomi dan Pembangunan guna mensejahterkan masyarakat.maka dari itu penelitian ini relevan dengan riview diatas karena sama-sama membahas kedudukan dan fungsi danantara itu sendiri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam kajian ini menerapkan metode kajian normatif. Tipe kajian ini bermaksud untuk merumuskan norma-norma baru. Akibatnya, hasilnya dapat berupa regulasi baru yang memperbaiki regulasi sebelumnya atau mengoreksi kekurangan-kekurangannya (sebagaimana dikutip dari Deepublish). Oleh karena itu, penelitian ini sangat sesuai dengan penelitian hukum normatif, yang diharapkan mampu menganalisis bagaimana aturan hukum tersebut diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2. Sumber data**

Dalam penelitian ini terdapat dua referensi yang diterapkan seperti data sekunder serta komposisi hukum. Data tambahan merupakan data yang diambil di beberapa macam literatur ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen resmi atau laporan sedangkan Bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga macam jenis utama, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data tambahan

1) Literatur ilmiah

- a) Dr. H. UU Nurul Huda SH.,MH.,S.Ag (2020) *hukum lembaga negara*. Bandung:Pt Refika Aditama
- b) Bagus anwar H, SH., MH.,M.Sc (2016) *hukum kelembagaan negara*. Google books:repository:widyamataram.

2) Penelitian terdahulu

- a) Hidayati, rahma. (2025) efek dengan adanya danantara terhadap pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di Indonesia. *Jurnal keuangan dan perbankan*.
- b) Magdalena,maria, dan Fontaine butarbutar (2025) status dan pengawasannya dalam sistem ketatanegaraan. *Arus jurnal sosial dan humaniora*.

b. Bahan hukum

- 1) Bahan hukum primer: dalam hal ini terdapat dua landasan norma yaitu UU No 1 tahun 2025 Tentang perubahan ketiga atas UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN.<sup>15</sup> dan peraturan

---

<sup>15</sup> Pemerintah Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

pemerintah no 10 tahun 2025 Tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara.<sup>16</sup>

- 2) Komposisi hukum tambahan:menggunakan bahan hukum yang berupa jurnal atau kajian terdahulu.
- 3) Komposisi hukum pendukung:bahan yang menelaah dari bahan hukum priemer serta komposisi hukum tambahan seperti kamus maupun ensiklopedia.

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam hal ini peneliti menerapkan sistem pengambilan data melalui cara studi Pustaka (*literature research*). Studi Pustaka bertujuan berperan menentukan dasar utama supaya mempermudah penulis mengetahui kemajuan dari kajian berdasarkan penelitian di sektornya, melihat ruang kajian, serta mendapatkan kerangka teori dan kerangka konseptual sesuai dasarnya (ruang akaedemis.com).

### 4. Analisis data

- a. Metode perundang-undangan (*Statute Approach*) metode ini ialah pendekatan sering melibatkan kajian mendalam terhadap seluruh norma dan peraturan relevan berdasarkan masalah hukum yang sedang dikaji oleh penulis. konteks pemahaman yang mudah, metode ini dilaksanakan dengan memahami secara rinci suatu

---

<sup>16</sup> Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara” (2025), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314627/pp-no-10-tahun-2025>.

norma yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi sumber topik penelitian.<sup>17</sup>

- b. Metode Konseptual (*Conceptual Approach*) dipilih supaya membahas pemikiran hukum yang teruji atau terjamin, seperti teori lembaga negara, konsep sui generis dalam pembentukan entitas hukum publik, serta teori pengawasan kekuasaan negara dan *checks and balances*.<sup>18</sup>
- c. Pendekatan historis (*historis approach*) metode pendekatan ini adalah suatu metode yang melibatkan analisis terhadap aspek-aspek sejarah. Pemahaman mendalam mengenai alur pemikiran sosial, politik, dan ekonomi terkait dengan penulis serta hasil dokumen yang tengah dikaji membuat suatu keharusan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pujiati, "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum," 2024, [https://doi.org/Pujiati\(2024\)MetodePenelitianYuridisNormatifdiBidangHukum](https://doi.org/Pujiati(2024)MetodePenelitianYuridisNormatifdiBidangHukum)  
<https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif>.

<sup>18</sup> Magdalena and Butarbutar, "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) Status Dan Pengawasannya Dalam Sistem Ketatanegaraan."

<sup>19</sup> Yira Dianti, "Definisi Pendekatan Historis," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU(E-BOOK)

Asshiddiqie, Jimly. "Lembaga Negara Pasca Reformasi," 2006, 368

Bagus Anwar. *Hukum Kelembagaan Negara*, 2016.

[http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/4\\_MODUL\\_HUKUM\\_KELEMBAGAAN\\_NEGARA.pdf](http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/4_MODUL_HUKUM_KELEMBAGAAN_NEGARA.pdf).

Dianti, Yira. "Definisi Pendekatan Historis." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB\\_2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf).

Huda, uu nurul. *Hukum Lembaga Negara*, 2020.

[https://digilib.uinsgd.ac.id/38717/1/Buku\\_Hukum\\_Lembaga\\_Negara.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/38717/1/Buku_Hukum_Lembaga_Negara.pdf).

Sihombing, Eka Nam. *Buku Hukum Kelembagaan Negara*, 2018

### B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Negara, Tambahan Lembaran. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2020," no. 037390 (1945).

Peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 75 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghasilan ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga non struktural, Pub. L. No. 05 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/112713/pmk-no-75pmk052017>.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314627/pp-no-10-tahun-2025>.

### C. JURNAL

Andi firdaus. "Indonesia Weighs Merging SOEs Ministry into Danantara Fund." Accessed September 19, 2025.

<https://en.antaranews.com/news/380929/indonesia-weighs-merging-soes-ministry-into-danantara-fund?>

- Astuti, Esther Sri. "Danantara Bagaimana Dan Siapa," 2025, 9.
- Bambang ismoyo. "Danantara to Cut SOEs to Just 300 Firms," n.d.  
<https://jakartaglobe.id/business/danantara-to-cut-soes-to-just-300-firms/>
- Basarah, Ahmad. "KAJIAN TEORITIS TERHADAP AUXILIARY STATE ` S  
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA," 2013, 1–8.
- Bemby Navita, Rosita Adelia Putri, Jacinda Az Zahra, Aurellia Mirabel  
Fredlyna, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru, and Kuswan Hadji.  
"Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan  
Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4,  
no. 1 (2025): 01–10. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4329>.
- Daro, Novena Margaretha. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH )  
Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (   
Danantara ) Jika Terjadi Kerugian Dalam" 5, no. 2 (2025).
- Hariru, La Ode, Suriani Bt Tolo, and La Niasa. "Kedudukan Hukum Badan  
Usaha Milik Negara (Persero) Sebagai Perusahaan Berbadan Hukum."  
*Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2022): 160–68.  
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.99>.
- Hasan, Rizkiyawan. "Dynamics of the Concept of Welfare State in Indonesia."  
*Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–19.
- Hidayati, Rahma. "Dampak Danantara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan  
Laju Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 21,  
no. 02 (2025): 197–208.
- Husen, La Ode. "Tinjauan Umum Tetang Sistem Ketatanegaraan Dalam Negara  
Hukum Yang Demokrasi," 2017, 21–56.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/10769>.
- Infantri, Vina Hardyana, and Retno Meilani. "Analisis Yuridis Pembentukan  
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)."  
*Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025):  
378–91. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5132/3901>.
- Iqbal Asnawi, M, Rini Fitriani, Wahdini Syafrina Tala, John Aikel Primsa  
Tarigan, T Maulana Daffa, and Wildan Habibi. "Locus: Jurnal Konsep

- Ilmu Hukum” 5, no. July (2024). <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>.
- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. “Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” 1, no. 2 (2020): 138–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- Liu, Natasa, and Irmanjaya Thaher. “Jurnal Ilmiah Hukum Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Publik Oleh Danantara : Tinjauan Konstitusional Dalam Pengawasan Eksternal Pencegahan Korupsi” 4, no. 4 (2025).
- Magdalena, Maria, and Fontaine Butarbutar. “Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) Status Dan Pengawasannya Dalam Sistem Ketatanegaraan” 5, no. 2 (2025).
- Maskur, Suherman. “Kedudukan Lemabaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktu Ketatatnegeraan” 6, no. 2 (2025): 66–74.
- Muh farhan, Rusyada. “Peran Dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF)” 2, no. 6 (2025): 969. <https://doi.org/10.1007/s10272-008-0268-5>.
- Nur Umar Azizah. “No Title,” 2025. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7794538/apa-itu-danantara-dan-apa-kaitannya-dengan-bumn-ini-penjelasan-singkatnya>.
- Pudyas, Mabruri salim. “BUMN Adalah Badan Usaha Milik Negara, Pahami Fungsi, Dan Peran Pentingnya Dalam Perekonomian Indonesia,” n.d.
- Pujiati. “Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum,” 2024. [https://doi.org/Pujiati\(2024\)MetodePenelitianYuridisNormatifdiBidangHukum](https://doi.org/Pujiati(2024)MetodePenelitianYuridisNormatifdiBidangHukum) <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif>.
- Rusyda, Muh Farhan Ar. “Peran Dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF).” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 969–88. <https://doi.org/10.1007/s10272-008-0268-5>.
- Sandi, Meidy Yanto, Muhammad Hadin Muhjad, and Akhmad Syaufi. “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero” 2, no. 3 (2023): 181–202.

Solihin, Dadang, Antoni Ludfi Arifin, and Joko Nugroho. "Danantara: Pilar Ekonomi Atau Beban Negara?" *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 12, no. NO. 1 JANUARI-APRIL (2025): 225–35.

Zein, Yahya Ahmad, and Muhammad Husin Ali. "Pengecualian Kerugian Danantara Dalam Prespektif Keuangan Negara: Analisis Yuridis Dan Potensi Celah Hukum," 2003.

#### D. ARTIKEL

Ayutia Nurita Sari. "Lembaga Pengelola Investasi, Bedanya Dengan Pengelola Investasi Sejenis?" Direktorat Jendral Kekayaan Negara, n.d.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Analisis Dan Evaluasi Hukum Pokja Peningkatan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan Di Bidang Pangan, Infrastruktur Dan Perumahan," n.d.'

Benny Eko Supriyanto. "Peninjauan Kembali Prinsip Akuntabilitas Dalam Hukum Perbendaharaan Negara: Implikasi Hukum Terhadap Kegagalan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran," n.d.

Dealls. "Pengertian, Jenis, Peran, Tugas, Fungsi, Dan Ciri-Ciri BUMN," n.d.

Dpr RI. "BUMN Adalah Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO)," n.d.

Ibnu Ismail. "Apa Itu Welfare State?" Accessed February 24, 2021. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/apa-itu-welfare-state/>.

Kantor Asisten Wakil Sekretaris Kabinet Bidang Dokumen Negara. "Regulasi Lembaga Pengelola Investasi Bertujuan Untuk Mengatasi Tantangan Pembiayaan Pembangunan," n.d.

kpu pegununganpapua. "Akuntabilitas Adalah: Pengertian, Prinsip, Dan Contohnya." 4 november 2025, n.d.

Lab Ilmu Pemerintahan. "Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan," n.d.

Maria Cicilia Galuh. "Erick Thohir Membeberkan Tugas BUMN Setelah

Danantara Beroperasi.” Accessed July 8, 2025.  
<https://www.antaranews.com/berita/4952857/erick-thohir-membeberkan-tugas-bumn-setelah-danantara-beroperasi?>

Menkeu. “Mengenal Danantara,” n.d.  
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/data-publikasi/artikel/3387-mengenal-danantara.html>.

Negara, Kantor Asisten Wakil Sekretaris Kabinet Bidang Dokumen.  
 “Pemerintah Menerbitkan Regulasi Tentang Lembaga Manajemen Investasi,” n.d.

Nela Arnani. “No Title,” 2025.  
<https://money.kompas.com/read/2025/02/20/102538226/apa-itu-danantara-ini-pengertian-dan-tujuan-pembentukannya?page=all#:~:text=Dasar hukum pembentukan dan struktur,setara Rp 325%2C8 triliun.>

Nur Umar Azizah. “No Title,” 2025.  
<https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7794538/apa-itu-danantara-dan-apa-kaitannya-dengan-bumn-ini-penjelasan-singkatnya>.

Riza Aslam Khaeron. “Keduanya Kelola Investasi, Ini Perbedaan LPI Dan Danantara,” n.d.

Rosyada Nanda Iriawan Ramadhan. “Pengertian BUMN: Ciri, Jenis, Tujuan, Fungsi, Dan Peran,” n.d.  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bumn/>.

Saleh, Muhamad. “Permasalahan Dan Risiko Hukum Pada Regulasi Pembentukan Danantara.” *Celios.Co.Id*, 2025, 1–2.  
<https://celios.co.id/legal-issues-and-risks-in-the-regulation-of-the-establishment-of-danantara/>.

Sunan, U I N, Gunung Djati, and Irma Mangar. “Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” 2022, 75–84.

Surya D.A. Simanjuntak. “Anniversary of the State-Owned Enterprises Ministry: Awaiting Mutualism between SOE Ministry and Danantara.” Accessed April 14, 2025.  
<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/april->

2025/anniversary-of-the-state-owned-enterprises-ministry-awaiting-mutualism-between-soe-ministry-and-danantara.html?

Salnah, Syarfina, Putri Febri Wialdi, and Yulia Hanoselina. "Tumpang Tindih Kewenangan Antar Kementrian: Tantangan Koordinasi Dalam Kabinet Yang Ekspansif Overlapping Authorities Among Ministries Coordination Challenges In An Expansive Cabinet," 2025, 18667–75.

Surya dua artha simanjuntak. "Menanti Simbiosis BUMN - Danantara." Accessed April 14, 2025.  
[https://ekonomi.bisnis.com/read/20250414/9/1868939/menanti-simbiosis-bumn-danantara?utm\\_source=chatgpt.com#goog\\_rewarded](https://ekonomi.bisnis.com/read/20250414/9/1868939/menanti-simbiosis-bumn-danantara?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded).

U.S Departement state. "2024 Investment Climate Statements: Indonesia." kedutaan besar AS jakarta, n.d.

Ulvia Nur Azizah. "Apa Itu Danantara Lembaga Baru Yang Akan Diluncurkan Prabowo? Ini Fungsinya," n.d.  
<https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-7783852/apa-itu-danantara-lembaga-baru-yang-akan-diluncurkan-prabowo-ini-fungsinya>.

Will Kenton. "Welfare State Explained: History, Principles, and Criticisms," n.d.